

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**

**BPTP Lampung**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.Drs.Jekvy Hendra,M.Si  
NIP. 196704171994031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Lain-lain

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
    - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan BPTP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 31 Desember 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 196704171994031002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Lampung Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp224.364.460, atau mencapai 264% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp85.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp9.683.166.312 atau mencapai 88,% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.041.071.000,

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp140.825.171.057, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11.700.000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp140.814.385.457; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp140.825.171.057,.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp91.374.647, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.146.190.607, sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp-11.054.815.960, Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.132.989.813, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp-10.921.826.147 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-10.921.826.147,.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp142.306.028.106, ditambah Defisit-LO sebesar Rp-10.921.826.147, kemudian Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas senilai Rp-17.832.754, dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp17.832.754, Transaksi Antar Entitas senilai Rp.-

9.458.801.852, Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp.-1.480.857.049, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp140.825.171.057,.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BPTP LAMPUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

| Uraian                        | Catatan | 31 Desember 2022      |                      |            | 31 Desember 2021      |
|-------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
|                               |         | Anggaran              | Realisasi            | %.         | Realisasi             |
| <b>PENDAPATAN</b>             |         |                       |                      |            |                       |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.    | 85.000.000,00         | 224.364.460          | 264        | 262.352.411           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      |         | <b>85.000.000,00</b>  | <b>224.364.460</b>   | <b>264</b> | <b>262.352.411</b>    |
| <b>BELANJA</b>                |         |                       |                      |            |                       |
| Belanja Pegawai               | B.3.    | 5.664.861.000         | 5.603.977.937        | 99         | 6.466.200.894         |
| Belanja Barang                | B.4.    | 5.291.210.000         | 3.994.259.875        | 75         | 8.078.379.018         |
| Belanja Modal                 | B.5.    | 85.000.000            | 84.928.500           | 100        | 0                     |
| <b>Jumlah Belanja</b>         |         | <b>11.041.071.000</b> | <b>9.683.166.312</b> | <b>88</b>  | <b>14.544.579.912</b> |



**II. NERACA**

**BPTP LAMPUNG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

| Uraian                                       | Catatan | 31 Desember 2022       | 31 Desember 2021       |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>                                  |         |                        |                        |
| <b>Aset Lancar</b>                           |         |                        |                        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                 | C.1.1.  | 0                      | 0                      |
| Persediaan                                   | C.1.4.  | 11.700.000             | 12.050.000             |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                    |         | <b>11.700.000</b>      | <b>12.050.000</b>      |
| <b>Aset Tetap</b>                            |         |                        |                        |
| Tanah  | C.2.1.  | 119.368.800.000        | 119.368.800.000        |
| Peralatan dan Mesin                          | C.2.2.  | 14.272.351.380         | 14.617.030.505         |
| Gedung dan Bangunan                          | C.2.3.  | 20.718.682.963         | 20.718.682.963         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                  | C.2.4.  | 4.294.988.889          | 4.294.988.889          |
| Aset Tetap Lainnya                           | C.2.5.  | 77.559.400             | 77.559.400             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap              | C.2.6.  | -17.917.997.175        | -16.783.083.651        |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                     |         | <b>140.814.385.457</b> | <b>142.293.978.106</b> |
| <b>Aset Lainnya</b>                          |         |                        |                        |
| Aset Tak Berwujud                            | C.4.1.  | 0                      | 3.565.000              |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4.3.  | 0                      | -3.565.000             |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                   |         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Jumlah Aset</b>                           |         | <b>140.825.171.057</b> | <b>142.306.028.106</b> |
| <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>               |         |                        |                        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>        |         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>                      |         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Ekuitas</b>                               |         |                        |                        |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>                        | C.6.    | <b>140.825.171.057</b> | <b>142.306.028.106</b> |
| <b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>          |         | <b>140.825.171.057</b> | <b>142.306.028.106</b> |

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BPTP LAMPUNG  
LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

| Uraian  | Catatan      | 31 Desember 2022       | 31 Desember 2021       |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |              |                        |                        |
| <b>PENDAPATAN</b>   |              |                        |                        |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                       | D.1.         | 91.374.647             | 89.970.219             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    |              | <b>91.374.647</b>      | <b>89.970.219</b>      |
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |              |                        |                        |
| Beban Pegawai   | D.2.         | 5.603.977.937          | 6.466.200.894          |
| Beban Persediaan  | D.3.         | 741.337.728            | 2.481.830.513          |
| Beban Barang dan Jasa                                       | D.4.         | 1.948.275.626          | 2.610.591.239          |
| Beban Pemeliharaan  | D.5.         | 887.868.782            | 884.350.261            |
| Beban Perjalanan Dinas                                      | D.6.         | 418.042.139            | 1.558.009.050          |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat             | D.8.         | 0                      | 599.647.955            |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | D.9.         | 1.546.688.395          | 1.660.518.773          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   |              | <b>11.146.190.607</b>  | <b>16.261.148.685</b>  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>            |              | <b>-11.054.815.960</b> | <b>-16.171.178.466</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             |              |                        |                        |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar                   | D.10.        | 85.474.598             | 155.368.699            |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                        | D.11.        | 122.410.598            | 171.999.999            |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                             | D.12.        | 36.936.000             | 16.631.300             |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang       | D.13.        | 0                      | 0                      |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang            | D.14.        | 0                      | 0                      |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                 | D.15.        | 0                      | 0                      |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       | D.16.        | 47.515.215             | 18.382.193             |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | D.17.        | 47.515.215             | 18.382.193             |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                 | D.18.        | 0                      | 0                      |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |              | <b>132.989.813</b>     | <b>173.750.892</b>     |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               |              | <b>-10.921.826.147</b> | <b>-15.997.427.574</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                       | <b>D.19.</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Beban Luar Biasa</b>                                     | <b>D.20.</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                       | <b>D.21.</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                 |              | <b>-10.921.826.147</b> | <b>-15.997.427.574</b> |

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BPTP LAMPUNG**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

| Uraian  | Catatan     | 31 Desember 2022       | 31 Desember 2021       |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                   | E.1.        | 142.306.028.106        | 144.185.354.109        |
| <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                             | E.2.        | -10.921.826.147.       | -15.997.427.574        |
| <b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> | E.3.        | 0                      | 0                      |
| <b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>       | E.4.        | -17.832.754            | -164.125.930           |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                                | E.3.1.      | 0                      |                        |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                              | E.3.2.      | 0                      | 0                      |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                            | E.3.3.      | 0                      | 0                      |
| SELISIH REVALUASI ASET                                | E.3.4.      | 0                      | 0                      |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI                      | E.3.5.      | -17.832.754            | -164.125.930           |
| LAIN-LAIN   | E.3.6.      | 0                      | 0                      |
| <b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>                        | E.5.        | 9.458.801.852          | 14.282.227.501         |
| <b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>                     | E.6.        | -1.480.857.049         | -1.879.326.003         |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                  | <b>E.7.</b> | <b>140.825.171.057</b> | <b>142.306.028.106</b> |

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Lampung

Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor : 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13 Desember 1994.

BPTP merupakan fungsi unit kerja Eselon IIIa yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Pejabat Eselon IV.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

#### VISI MISI BPTP LAMPUNG

##### VISI

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem **pertanian bio-industri tropika** berkelanjutan.

##### MISI

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.

##### TUJUAN

- Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
- Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

##### SASARAN STRATEGIS BALITBANGTAN

- Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan *advanced technology* dan *bioscience*.
- Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis *bioscience* dan *bioengineering* dengan memanfaatkan *advanced technology*, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
- Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
- Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

- Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
- Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

#### TUGAS POKOK

- Melaksanakan Pengkajian dan Perakitan Teknologi Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi

#### FUNGSI

- Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Penyiapan dan perakitan paket teknologi spesifik lokasi untuk penyusunan materi penyuluhan pertanian;
- Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, penelitian dan perakitan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha & rumah tangga Balai

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

BPTP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0,5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat    |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan            | 5 s.d 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun         |

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud   | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer  | 04                   |
| Franchise  | 05                   |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                    | 25                   |

| Kelompok Aset Tak Berwujud  | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|----------------------|
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50                   |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I   | 70                   |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

BPTP Lampung menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0,5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat    |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan            | 5 s.d 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun         |

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud   | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer  | 04                   |
| Franchise  | 05                   |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                    | 25                   |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram        | 50                   |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I  | 70                   |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian  | Anggaran Awal         | Anggaran Setal Revisi |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pendapatan</b>   |                       |                       |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 85.000.000,00         | 85.000.000,00         |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>85.000.000,00</b>  | <b>85.000.000,00</b>  |
| <b>Belanja</b>  |                       |                       |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS  | 6.381.490.000         | 5.463.966.000         |
| Belanja Lembur  | 144.910.000           | 200.895.000           |
| Belanja Barang Operasional  | 1.043.729.000         | 1.021.784.000         |
| Belanja Barang Non Operasional  | 1.656.469.000         | 1.273.769.000         |
| Belanja Barang Persediaan   | 2.475.109.000         | 765.900.000           |
| Belanja Jasa  | 393.500.000           | 240.968.000           |
| Belanja Pemeliharaan  | 884.805.000           | 876.589.000           |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri   | 2.303.200.000         | 1.112.200.000         |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda  | 1.260.000.000         | 0                     |
| Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda                                 | 540.000.000           | 0                     |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 100.000.000           | 85.000.000            |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 0                     |                       |
| <b>Jumlah Belanja</b>   | <b>17.183.212.000</b> | <b>11.041.071.000</b> |

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp224.364.460, atau mencapai 264,% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp85.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian  | 2022                 |                    |               |
|---|----------------------|--------------------|---------------|
|   | Anggaran             | Realisasi          | .%            |
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya | 5.508.000,00         | 19.560.000         | 355,12        |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                             | 0                    | 122.410.598        | 0             |
| Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan                                 | 0                    | 3.410.647          | 0             |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi             | 2.330.000            | 0                  | 0             |
| Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya      | 77.162.000,00        | 48.240.000         | 62,52         |
| Pendapatan Hasil Penelitian /Riset dan Hasil Pengembangan Iptek           | 0                    | 20.164.000         | 0             |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai            | 0                    | 6.599.215          | 0             |
| Penerimaan kembali Belanja TAYL   | 0                    | 3.980.000          | 0             |
| <b>Jumlah</b>   | <b>85.000.000,00</b> | <b>224.364.460</b> | <b>263,96</b> |

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami Penurunan sebesar 14,47 % dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | .%            |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya      | 19.560.000                 | 0                          | 100           |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin/Pendapatan Pemindahan Tangan BMN | 122.410.598                | 171.999.999                | -0,28         |
| Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan                                      | 3.410.647                  | 4.360.219                  | -21,77        |
| Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya           | 48.240.000                 | 16.461.000                 | 65,87         |
| Pendapatan Hasil Penelitian /Riset dan Hasil Pengembangan Iptek                | 20.164.000                 | 69.139.000                 | -70,83        |
| Pendapatan Jasa Giro   | -                          | 10.000                     | -100          |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai                 | 6.599.215                  | 0                          | 100           |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL  | 3.980.000                  | 177.193                    | 95,54         |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL   | -                          | 205.000                    | -100          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>224.364.460</b>         | <b>262.352.411</b>         | <b>-14,47</b> |

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp9.683.166.312, atau 88 % dari anggaran belanja sebesar Rp11.041.071.000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2022

| Uraian                      | 2022                 |                      |              |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                             | Anggaran             | Realisasi            | .%           |
| Belanja Pegawai             | 5.664.861.000        | 5.607.181.900        | 99           |
| Belanja Barang              | 5.291.210.000        | 3.994.259.875        | 75           |
| Belanja Modal               | 85.000.000           | 84.928.500           | 100          |
| <b>Total Belanja Kotor</b>  | <b>5.664.861.000</b> | <b>5.607.181.900</b> | <b>99,32</b> |
| <b>Pengembalian Belanja</b> | <b>0</b>             | <b>3.203.963</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Belanja</b>        | <b>5.664.861.000</b> | <b>5.603.977.937</b> | <b>88</b>    |

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -33,42% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran untuk kegiatan Belanja Barang Non Operasional , Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan dalam Negeri pagunya lebih kecil dan Anggaran di Blokir sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana sehingga untuk belanja barang pada tahun 2022 mengalami penurunan

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian               | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | .%            |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai      | 5.603.977.937              | 6.466.200.894              | -13,33        |
| Belanja Barang       | 3.994.259.875              | 8.078.379.018              | -50,55        |
| Belanja Modal        | 84.928.500                 | 0                          | 100,00        |
| <b>Total Belanja</b> | <b>9.683.166.312</b>       | <b>14.544.579.912</b>      | <b>-33,42</b> |

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.603.977.937, dan Rp6.466.200.894. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar -13,33% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung untuk belanja pegawai mengalami penurunan disebabkan pengurangan pegawai yang alih mutasi tugas ke Badan Riset Inovasi Nasional sebanyak 21 Pegawai dan Pensiun 1 Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian                         | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 5.407.938.900              | 6.325.893.190              | -14,51         |
| Belanja Lembur                 | 199.243.000                | 144.887.000                | 27,28          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>    | <b>5.607.181.900</b>       | <b>6.470.780.190</b>       | <b>-13,34</b>  |

| Uraian                       | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pengembalian Belanja Pegawai | -3.203.963                 | -4.579.296                 | 30,03          |
| <b>Jumlah Belanja</b>        | <b>5.603.977.937</b>       | <b>6.466.200.894</b>       | <b>13,33</b>   |

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.994.259.875 dan Rp8.078.379.018. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami Penurunan sebesar 50,55% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu Anggaran lebih kecil untuk kegiatan Belanja Barang Non Operasional , Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan dalam Negeri pagunya lebih kecil dan Anggaran di Blokir sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana sehingga untuk belanja barang pada tahun 2022 mengalami penurunan

#### Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian  | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional                                      | 1.021.441.453              | 875.546.247                | 14,28          |
| Belanja Barang Non Operasional                                  | 719.221.700                | 1.354.981.500              | -46,92         |
| Belanja Barang Persediaan                                       | 752.190.328                | 2.425.780.513              | -69            |
| Belanja Jasa  | 207.612.473                | 380.063.492                | -45,37         |
| Belanja Pemeliharaan  | 875.751.782                | 884.350.261                | 0,98           |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri                                 | 418.042.139                | 1.558.009.050              | -7316          |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda        | 0                          | 158.658.155                | -100           |
| Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0                          | 440.989.800                | -100           |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                               | 84.928.500                 | 0                          | 100            |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                                     | <b>3.994.259.875</b>       | <b>8.078.379.018</b>       | <b>-50,55</b>  |
| <b>Pengembalian Belanja Barang</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>    |
| <b>Jumlah Belanja</b>   | <b>3.994.259.875</b>       | <b>8.078.379.018</b>       | <b>-50,55</b>  |

AKUN KOPIT BELUM

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2022

| Uraian                       | 31 Desember 2022 |
|------------------------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0                |
| <b>Jumlah</b>                | <b>0</b>         |

#### C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.700.000, dan Rp12.050.000, Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian             | 31 Desember 2022  | 31 Desember 2021  |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Barang Konsumsi    | 0                 | 350.000,00        |
| Bahan Baku         | 0                 | 0                 |
| Persediaan Lainnya | 11.700.000        | 11.700.000        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>11.700.000</b> | <b>12.050.000</b> |



## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp119.368.800.000,00 dan Rp119.368.800.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>119.368.800.000,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah</b>                              |                           |
| Reklasifikasi Masuk                               | 1.144.902.000,00          |
| <b>Mutasi Kurang</b>                              |                           |
| Reklasifikasi Keluar                              | -1.144.902.000,00         |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>119.368.800.000,00</b> |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

- Penyesuaian dengan perubahan harga tanah

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.272.351.380 dan Rp14.617.030.505. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>14.617.030.505</b> |
| <b>Mutasi Tambah</b>                              |                       |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap     | 25.150.000            |
| Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap              | 32.400.000            |
| <b>Mutasi Kurang</b>                              |                       |
| Penghapusan                                       | -254.729.125          |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>14.272.351.380</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022         | -13.062.569.692       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>1.209.781.688</b>  |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Tahun 2022 Penambahan Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Soun System

2. Mutasi Pengurangan disebabkan penghentian barang-barang yg sudah rusak dan tidak terpakai

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.718.682.963, dan Rp20.718.682.963,.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.294.988.889, dan Rp4.294.988.889,.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp77.559.400, dan Rp77.559.400,.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-17.917.997.175, dan Rp-16.783.083.651, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No                          | Aset Tetap                  | Nilai Perolehan       | Akm. Penyusutan        | Nilai Buku            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.                          | Peralatan dan Mesin         | 14.272.351.380        | -13.062.569.692        | 1.209.781.688         |
| 2.                          | Gedung dan Bangunan         | 20.718.682.963        | -3.646.850.252         | 17.071.832.711        |
| 3.                          | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.294.988.889         | -1.208.577.231         | 3.086.411.658         |
| 4.                          | Aset Tetap Lainnya          | 77.559.400            | 0,00                   | 77.559.400            |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b> |                             | <b>39.363.582.632</b> | <b>-17.917.997.175</b> | <b>21.445.585.457</b> |

## C.4. ASET LAINNYA

#### C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.565.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Lampung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>3.565.000</b> |
| <b>Mutasi Kurang</b>                              |                  |
| Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap     | 0                |
| Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)   | 0                |
| Penghapusan (BMN yang dihentikan)                 | -3.565.000       |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>0,00</b>      |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022         | 0,00             |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>0,00</b>      |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

- Penghapusan (BMN yang dihentikan ) sebesar Rp-3.565.000 Barang yang sudah tidak digunakan/rusak

#### C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-3.565.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Aset Lainnya                | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku  |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|    | <b>Akumulasi Penyusutan</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 202 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp140.825.171.057 dan Rp142.306.028.106. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp91.374.647 dan Rp89.970.219. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya      | 19.560.000                 | 0                          | 100            |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin/Pendapatan Pemindahan Tangan BMN | 122.410.598                | 171.999.999                | -0,28          |
| Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan                                      | 3.410.647                  | 3.376.321                  | -21,77         |
| Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya           | 48.240.000                 | 16.461.000                 | 65,87          |
| Pendapatan Hasil Penelitian /Riset dan Hasil Pengembangan Iptek                | 20.164.000                 | 66.139.000                 | -70,83         |
| Pendapatan Jasa Giro   | 0                          | 10.000                     | -100           |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai                 | 6.559.215                  | 0                          | 100            |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL  | 3.980.000                  | 177.193                    | -100           |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL   | 0                          | 205.000                    | -100           |
| <b>Jumlah</b>  | <b>224.364.460</b>         | <b>262.352.411</b>         | <b>-14,47</b>  |

- Pendapatan Negara Bukan Pajak BPTP Lampung mengalami Penurunan sebesar 14,47 % dikarnaka perubahan cuaca.

- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp. 224.364.460,-

- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LO Rp. 91.374.647,-

Terdapat selisih senilai Rp. 132.989.813

- Realisasi PNBPN Pada LO adalah Pendapatan Fungsional

Selisih yg tidak terdapat pada LO adalah Pendapatan Umum berupa :

- Pendapatan dan pemindah tangan BMN Lainnya senilai Rp. 122.410.598

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Pend. Peny. Ganti Kerugian Neg terhadap Pegawai | Rp. 6.599.215          |
| - Penerimaan Kembali B.Pegawai TAYL               | <u>Rp. 3.980.000</u>   |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>Rp. 132.989.813</b> |

## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.603.977.937 dan Rp6.466.200.894. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian                      | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS        | 3.474.986.280              | 3.990.141.700              | -12,90         |
| Beban Pembulatan Gaji PNS   | 46.803                     | 56.994                     | -17,88         |
| Beban Tunj. Anak PNS        | 78.414.738                 | 89.292.682                 | -12,18         |
| Beban Tunj. Beras PNS       | 202.196.640                | 229.861.080                | -12,03         |
| Beban Tunj. Fungsional PNS  | 767.710.000                | 997.360.000                | -23,02         |
| Beban Tunj. PPh PNS         | 51.384.096                 | 64.523.138                 | -20,36         |
| Beban Tunj. Struktural PNS  | 17.640.000                 | 25.200.000                 | -30            |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 252.193.230                | 286.632.350                | -12,01         |
| Beban Tunjangan Umum PNS    | 68.820.000                 | 68.810.000                 | 98             |
| Beban Uang Lembur           | 199.243.000                | 144.887.000                | 37,51          |
| Beban Uang Makan PNS        | 491.343.150                | 569.435.950                | -13,71         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>5.603.977.937</b>       | <b>6.466.200.894</b>       | <b>-13,33</b>  |

Beban Belanja Pegawai pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar -13,33 % disebabkan Pagu lebih kecil dari tahun sebelumnya dan BPTP mendapat pengurangan pegawai yang alih mutasi tugas ke Badan Riset Inovasi Nasional sebanyak 21 Pegawai dan Pensiun 1 Pegawai

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp741.337.728. dan Rp2.481.830.513,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian                      | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Persediaan bahan baku | 19.330.000                 | 192.913.800                | -89,97         |
| Beban Persediaan konsumsi   | 705.557.728                | 2.282.186.713              | -69,08         |
| Beban persediaan lainnya    | 16.450.000                 | 6.730.000                  | 59,08          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>741.337.728</b>         | <b>2.481.830.513</b>       | <b>70,12</b>   |

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.948.275.626 dan Rp.2.610.591.239. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bahan  | 115.116.200                | 187.163.000                | -38,49         |
| Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | -                          | 551.295.000                | -100           |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                       | 604.105.500                | 449.023.500                | 25,67          |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19     | 21.638.700                 | 14.923.100                 | 31             |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja                       | 193.560.000                | 193.560.000                | 0              |
| Beban Honor Output Kegiatan                                | 0                          | 167.500.000                | -100           |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19                   | 668.000                    | 53.900.000                 | -99            |

| Uraian                          | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Jasa Profesi              | 6.000.000                  | 70.300.000                 | -91            |
| Beban Keperluan Perkantoran     | 781.363.428                | 642.152.947                | 18             |
| Beban Langganan Listrik         | 191.944.473                | 168.993.694                | 12             |
| Beban Langganan Telepon         | 9.000.000                  | 8.969.798                  | 0              |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 24.879.325                 | 24.910.200                 | 0              |
| Beban Sewa                      | -                          | 77.900.000                 | -100           |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>1.948.275.626</b>       | <b>2.610.591.239</b>       | <b>-25</b>     |

- Realisasi beban barang dan Jasa pada tahun 2022 sebesar -25 % mengalami penurunan disebabkan Pagu Anggaran lebih kecil sehingga kegiatan berkurang

- Pagu anggaran penanganan pandemi covid- sebesar Rp.42.923.000,- dengan realisasi senilai Rp.42.396.325,-(99,35%) sehingga sisa anggaran Rp.277.675

- (521131) Belanja Barang Operasional Penangan Pandemi COVID-19 Realisasi senilai Rp.21.638.000,- berupa pembelian : Pembelian Madu, Vitamin dan Redoxon dll

- (521841) Belanja Barang Persediaan Penangan Pandemi COVID-19 Realisasi senilai Rp.20.089.000,- berupa pembelian : Eucaliptus,handsanitiser,Masker dan Eucaliptus Spray dll

- (522192) Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID- 19 Realisasi Senilai Rp. 668.000,- berupa : Rapid tes antigen dan Swab PCR



#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp887.868.782 dan Rp884.350.261. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 158.159.300                | 158.057.000                | 100            |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 47.962.000                 | 47.957.000                 | 99             |
| Beban Pemeliharaan Jaringan                    | 13.386.750                 | 19.196.750                 | -30            |
| Beban Pemeliharaan Lainnya                     | 113.925.000                | 114.035.000                | 0              |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 542.318.732                | 545.104.511                | 0              |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan      | 12.117.000                 | 0                          | 100            |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>887.868.782</b>         | <b>884.350.261</b>         | <b>0,39</b>    |

- Beban pemeliharaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,39 dikarenakan ada beban pemeliharaan peralatan dan mesin pada tahun 2022 realisasi lebih besar dibandingkan tahun 2021 ada penambahan realisasi beban persediaan bahan untuk pemeliharaan .

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp418.042.139 dan Rp1.558.009.050. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa                               | 388.042.139                | 1.167.606.310              | -67            |
| Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0                          | 355.918.000                | -100           |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 30.000.000                 | 34.484.740                 | -13            |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota      | 0                          | 0                          | 0              |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota       | 0                          | 0                          | 0              |
| <b>Jumlah</b>  | <b>418.042.139</b>         | <b>1.558.009.050</b>       | <b>-73</b>     |

- Beban Perjalanan dinas 31 Desember 2022 mengalami Penurunan sebesar 73 % disebabkan pagu anggaran lebih kecil dari tahun sebelumnya

#### D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp599.647.955, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian  | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0                          | 90.000.000                 | 0,00           |
| Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah   | 0                          | 141.000.000                | 0,00           |
| Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat   | 0                          | 368.647.955                | 0,00           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>0</b>                   | <b>599.647.955</b>         | <b>0,00</b>    |

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.546.688.395 dan Rp1.687.952.326. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2022 | Realisasi 31 Desember 2021 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   | 630.324.545                | 640.352.411                | -0,18          |
| Beban Penyusutan Irigasi   | 59.047.822                 | 59.047.822                 | 0,00           |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan  | 77.468.457                 | 77.468.457                 | 0,00           |
| Beban Penyusutan Jaringan  | 37.421.013                 | 37.421.014                 | -49,44         |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 0                          | 0                          | -100,00        |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 742.426.558                | 873.662.622                | -19,73         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>1.546.688.395</b>       | <b>1.687.952.326</b>       | <b>-8</b>      |

Beban Penyusutan Amortisasi 31 Desember 2022 Rp.1.546.688.395, mengalami penurunan sebesar - 8 % dikarenakan Penyusutan perubahan Nilai setiap tahun

#### D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian   | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Surplus /defisit Pelepasan Aset Non Lancar                             | 85.474.598                 | 16.631.300                 |                |
| Pendapatan Perolehan Aset Lainnya                                      | 0                          | 18.000.000                 |                |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya/Pelepasan Aset Non Lancar | 47.515.215                 | 171.999.999                |                |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu             | 0                          | 205.000                    |                |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu            | 0                          | 177.193                    |                |
| <b>Jumlah</b>  | <b>132.989.813</b>         | <b>173.750.892</b>         | <b>-23</b>     |

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp140.825.171.057 dan Rp142.306.028.

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-10.921.826.147 dan Rp-15.997.427.574. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-17.832.754 dan Rp.164.125.930.

#### **E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

#### **E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

| Jenis Koreksi  | Nilai Koreksi 31 Desember 2022 |
|--|--------------------------------|
| Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0                              |
| Peralatan dan Mesin  | 0                              |
| <b>Jumlah</b>  | <b>0</b>                       |

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.458.801.852 dan Rp14.282.227.501. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

| Jenis Koreksi              | Nilai Koreksi 31 Desember 2022 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 9.683.166.312                  |
| Diterima dari Entitas Lain | -224.364.460                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>9.458.801.852</b>           |

##### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-9.683.166.312 sedangkan DKEL sebesar Rp-224.364.460.

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp140.825.171.057 dan Rp142.306.028.106.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Rekening Bendahara tahun 2021 menjadi Nama Rekening (BPG 017 BPTP Lampung) tidak ada perubahan rekening

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

- BPTP Lampung mendapat Anggaran SP DIPA 018.09.02.567517/2022 tgl 17 November 2021 pagu sebesar Rp.17.183.212.000 ,Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung mengalami Revisi DIPA sebanyak 4 kali
- Revisi ke I tanggal 17 Maret 2022 untuk penambahan pengalokasian Anggaran UHL sebesar Rp.300.000.000,-
- Revisi 2 tanggal 3 Juni 2022 Automatic Adjustment sebesar Rp.267.624.000
- Revisi ke 3 tanggal 8 Juli 2022 Revisi Hal III
- Revisi ke 4 tanggal 27 September 2022 penghapusan anggaran litbangjirab Sebesar Rp.5.550.000.000,-
- Revisi 5 tanggal 14 Oktober 2022 alokasi belanja pegawai perbenihan dan program Instrumen pertanian

### F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Terdapat utang yang belum ditagihkan senilai Rp.914.400 yaitu berupa pembelian Snack rapat yang merupakan double input data oleh Operator modul pembayaran terkait hal tersebut telah bertiket ke Hai DJPB melalui tiket 202301200120-X2C1R3 mengenai permohonan penghapusan 2 transaksi tersebut.
- Akun 491429- (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) senilai Rp.36.936.000,- berupa pembelian peralatan dan mesin berupa Sound System, LCD, Proyektor oleh Operator Modul Pembayaran dicatat pada menu KDP sehingga pada Modul Aset dilakukan dengan Menu perolehan lainnya

#### F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan elaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung pada tanggal 4 Januari 2021 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Drs.Jekvy Hendra, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen : Agung Lasmono,SP

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Arfi Irawati, SP

Bendahara : Artha Muchtar Djalil,SP